

ESG, INVESTASI HIJAU, DAN MASA DEPAN BISNIS DI INDONESIA

Membangun Nilai Berkelanjutan,
Daya Saing Global,
dan Ketahanan Ekonomi
untuk Generasi Mendatang



ENVIRONMENTAL



SOCIAL



GOVERNANCE

“ Mengintegrasikan ESG dan Investasi Hijau
untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan
dan Berdaya Saing di Masa Depan ”

Oleh

RUDY C TARUMINGKENG

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

4 April 2026

ESG, INVESTASI HIJAU, DAN MASA DEPAN BISNIS DI INDONESIA

Abstrak

ESG (Environmental, Social, and Governance) tidak lagi dapat dipahami sebagai agenda pinggiran yang hanya relevan bagi perusahaan besar atau investor internasional. Di Indonesia, ESG kian menjadi bahasa baru bagi daya saing, akses modal, legitimasi sosial, dan ketahanan bisnis jangka panjang. Perkembangan regulasi OJK, hadirnya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan di pasar modal, tumbuhnya pasar karbon melalui IDXCarbon, serta integrasi agenda ekonomi hijau ke dalam RPJPN 2025–2045 dan dokumen iklim nasional menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional semakin mendorong dunia usaha untuk bergerak dari model bisnis ekstraktif menuju model yang lebih bertanggung jawab, adaptif, dan transisional. Pada saat yang sama, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara ambisi kebijakan dan realitas implementasi, termasuk keterbatasan data, risiko greenwashing, ketimpangan kapasitas perusahaan, persoalan kehutanan, serta kontroversi lingkungan dalam sektor-sektor strategis seperti mineral dan energi. Makalah ini berargumen bahwa masa depan bisnis di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan menerjemahkan ESG bukan sekadar sebagai pelaporan, tetapi sebagai arsitektur nilai: mulai dari tata kelola, pembiayaan, desain operasi, manajemen risiko, hingga relasi dengan masyarakat. Investasi hijau, dalam konteks ini, bukan hanya sumber

dana, melainkan mekanisme seleksi atas bisnis mana yang pantas tumbuh di masa depan. ([OJK Portal](#))

Kata kunci

ESG; investasi hijau; keuangan berkelanjutan; TKBI; bisnis Indonesia; pasar karbon; transisi energi; tata kelola.

ESG, Investasi Hijau, dan Masa Depan Bisnis di Indonesia

Isi Makalah

1. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, dunia bisnis mengalami perubahan mendasar dalam cara nilai perusahaan diukur. Jika pada era sebelumnya keberhasilan terutama dinilai dari pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, dan ekspansi pasar, maka kini semakin banyak pemangku kepentingan menilai perusahaan juga dari dampaknya terhadap lingkungan, kualitas hubungannya dengan pekerja dan komunitas, serta integritas tata kelolanya. Perubahan ini bukan sekadar tren moral atau mode manajerial. Ia tumbuh dari realitas bahwa perubahan iklim, disrupsi sosial, krisis rantai pasok, dan kegagalan tata kelola telah terbukti memengaruhi biaya modal, reputasi, stabilitas operasional, dan daya tahan perusahaan. Karena itu, ESG berkembang menjadi kerangka yang menghubungkan laba, legitimasi, dan keberlanjutan. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Di Indonesia, perkembangan ini memperoleh bentuk institusional yang semakin jelas. OJK telah mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik melalui POJK 51/2017. Regulasi itu mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai

dukungan menyeluruh sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Regulasi yang sama juga mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan serta rencana aksi keuangan berkelanjutan, sehingga isu ESG masuk ke ruang tata kelola formal, bukan sekadar slogan komunikasi perusahaan. ([OJK Portal](#))

Dari sudut kebijakan pembangunan, posisi ESG juga semakin menguat. Bappenas menempatkan ekonomi hijau sebagai bagian sentral dari arah pembangunan jangka panjang, dan dalam 2025–2026 pemerintah terus memperlihatkan upaya memperluas ekosistem investasi hijau, termasuk melalui kerangka Green SMEs, kemitraan Green Indonesia Future Initiative, dan pengumuman komitmen investasi internasional senilai USD 22 miliar untuk kawasan industri hijau berkelanjutan di World Expo Osaka 2025. Dengan demikian, ESG di Indonesia bergerak dari wacana normatif menjadi bagian dari desain institusional pembangunan. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: bagaimana ESG dan investasi hijau membentuk masa depan bisnis di Indonesia? Untuk menjawabnya, pembahasan akan dimulai dari kerangka konseptual ESG, lalu menelaah arsitektur kebijakan Indonesia, instrumen investasi hijau, peluang sektoral, tantangan implementasi, dan implikasi manajerial bagi perusahaan. Tesis utama makalah ini adalah bahwa masa depan bisnis di Indonesia bukanlah masa depan yang “lebih hijau” dalam arti kosmetik, melainkan masa depan yang menuntut restrukturisasi strategi perusahaan agar sejalan dengan logika transisi, transparansi, dan tanggung jawab sosial-lingkungan. ([OJK Portal](#))

2. ESG sebagai Pergeseran Paradigma Bisnis

ESG sering dipersempit menjadi daftar periksa. Padahal, secara substantif ESG adalah cara baru membaca risiko dan peluang perusahaan. Dimensi environmental tidak hanya berbicara tentang emisi, limbah, atau energi terbarukan, tetapi juga tentang bagaimana bisnis merespons kelangkaan

sumber daya, kerentanan iklim, perubahan regulasi, dan tuntutan dekarbonisasi. Dimensi social tidak hanya berhubungan dengan program CSR, melainkan mencakup keselamatan kerja, kualitas hubungan industrial, keadilan dalam rantai pasok, dampak terhadap komunitas lokal, dan daya jangkau produk terhadap kelompok rentan. Sementara itu, governance menjadi fondasi yang memastikan dua dimensi sebelumnya tidak berhenti pada narasi, melainkan diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan kontrol risiko yang kredibel. ([OJK Portal](#))

Dari perspektif manajemen strategis, ESG sesungguhnya menggeser pertanyaan inti perusahaan. Pertanyaan lama adalah: bagaimana bisnis menghasilkan laba sebesar mungkin? Pertanyaan baru adalah: bagaimana bisnis menghasilkan laba yang dapat dipertahankan tanpa merusak basis ekologis, tanpa mengorbankan legitimasi sosial, dan tanpa membangun struktur tata kelola yang rapuh? Karena itu, ESG tidak seharusnya diletakkan hanya di divisi komunikasi perusahaan atau tanggung jawab sosial, tetapi di jantung strategi korporasi. Ia menyentuh keputusan investasi, desain produk, pemilihan pemasok, sumber energi, akses pembiayaan, hingga struktur insentif eksekutif. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Dalam konteks pasar modal Indonesia, pergeseran paradigma ini terlihat dari upaya Bursa Efek Indonesia memperkuat infrastruktur data ESG. BEI memiliki indeks IDX ESG Leaders, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga saham yang menjadi pemimpin dalam rating ESG dan tidak memiliki kontroversi signifikan, dipilih dari saham yang likuid dan berkinerja keuangan baik. Selain itu, BEI pada 22 Januari 2025 meluncurkan ESG Reporting yang terintegrasi ke dalam sistem keterbukaan informasi emiten. Artinya, ESG makin diposisikan sebagai informasi yang relevan bagi investor, bukan semata materi promosi. ([Sustainability IDX](#))

Secara konseptual, hal ini penting karena investasi modern bekerja melalui informasi. Investor tidak dapat menilai kualitas transisi sebuah perusahaan

hanya dari iklan keberlanjutan. Mereka memerlukan data yang lebih terstruktur mengenai paparan risiko lingkungan, kualitas tata kelola, dan kemampuan perusahaan mengelola isu material. Ketika BEI menyediakan kanal ESG Reporting dan ESG Score, pasar mulai bergerak ke arah disiplin baru: perusahaan tidak cukup mengaku hijau; mereka harus menunjukkan bukti yang dapat dibandingkan. ([Sustainability IDX](#))

3. Arsitektur Kebijakan ESG dan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Pilar awal kebijakan ESG di Indonesia dibentuk melalui POJK 51/2017. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan prinsip investasi bertanggung jawab, strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, tata kelola, komunikasi yang informatif, inklusivitas, pengembangan sektor unggulan prioritas, serta koordinasi dan kolaborasi. Regulasi ini juga mewajibkan laporan keberlanjutan dipublikasikan setiap tahun. Dengan demikian, kerangka Indonesia sejak awal memang memadukan aspek E, S, dan G dalam satu desain regulatif, bukan memisahkannya. ([OJK Portal](#))

Langkah berikutnya adalah penguatan ekosistem. OJK menegaskan bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021–2025 berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dan percepatan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Di sini terlihat bahwa negara mulai memahami bahwa ESG tidak bisa hidup hanya dari satu kewajiban pelaporan. Ia memerlukan taksonomi, instrumen pembiayaan, peningkatan kapasitas, pengawasan, dan infrastruktur informasi. ([OJK Portal](#))

Penguatan paling penting datang melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. OJK pada 2026 menerbitkan TKBI Versi 3 sebagai versi komprehensif. OJK menjelaskan bahwa TKBI dipakai sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan guna mendorong target net zero Indonesia, dengan prinsip scientific and

credible, interoperable, mendukung kepentingan nasional, dan inklusif untuk korporasi maupun UMKM. Dalam FAQ dan materi taksonomi, OJK juga menegaskan bahwa taksonomi membantu mengurangi greenwashing, social washing, dan impact washing, sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan pelaporan, insentif-disinsentif, dan produk keuangan berkelanjutan. ([OJK Portal](#))

Secara praktis, taksonomi berarti negara berupaya menjawab satu persoalan klasik ESG: apa yang sebenarnya layak disebut hijau, transisi, atau berkelanjutan? Tanpa klasifikasi yang jelas, hampir semua perusahaan dapat mengklaim dirinya berkontribusi pada keberlanjutan. TKBI penting karena ia mengubah perdebatan moral menjadi bahasa klasifikasi ekonomi. Bahasa klasifikasi inilah yang diperlukan bank, investor, emiten, auditor, dan regulator untuk menyusun portofolio, menilai proyek, dan memisahkan komitmen yang kredibel dari pencitraan yang dangkal. ([OJK Portal](#))

Perkembangan terbaru lain yang menunjukkan pendewasaan kebijakan adalah peluncuran Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025 dan Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) 2026 oleh OJK. SMART memetakan kematangan penerapan keberlanjutan pada sektor perbankan Indonesia—meliputi tata kelola, strategi, manajemen risiko, pembiayaan berkelanjutan, pengungkapan, dan kapasitas internal—sementara CBRA menilai potensi dampak risiko iklim terhadap kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan bank secara forward-looking. OJK menyatakan bahwa secara agregat perbankan Indonesia memiliki kapasitas modal yang memadai pada skenario transisi yang terkelola, tetapi integrasi risiko iklim masih perlu diperkuat secara sistematis. Ini menunjukkan bahwa ESG di Indonesia bergerak dari fase kepatuhan menuju fase pengukuran ketahanan. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Dari sudut kebijakan iklim nasional, konteksnya juga berubah. Dokumen Second NDC Indonesia yang diserahkan ke UNFCCC pada 27 Oktober 2025 menegaskan bahwa NDC kedua dipandu oleh RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, menjaga ambisi net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Dokumen tersebut juga menggeser pendekatan target dari format lama menuju target tingkat emisi yang lebih selaras dengan pembaruan metodologi. Bagi dunia usaha, hal ini penting karena menunjukkan bahwa transisi hijau bukan sekadar proyek sektoral, melainkan arah kebijakan nasional yang akan makin memengaruhi investasi, pembiayaan, dan standar operasi perusahaan. ([UNFCCC](#))

4. Investasi Hijau: Definisi, Instrumen, dan Aktor

Investasi hijau pada dasarnya merujuk pada penempatan modal ke proyek, aset, atau perusahaan yang berkontribusi pada tujuan lingkungan—seperti energi terbarukan, efisiensi energi, bangunan hijau, pengelolaan air, transportasi rendah karbon, ketahanan iklim, dan perlindungan ekosistem—dengan tetap memperhatikan tata kelola dan dampak sosial. Dalam konteks Indonesia, investasi hijau tumbuh melalui beberapa jalur sekaligus: instrumen fiskal pemerintah, pembiayaan bank, pasar modal, pembiayaan multilateral, investasi asing langsung, dan mekanisme pasar karbon. ([DJPPR](#))

Salah satu instrumen paling menonjol adalah green sukuk. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa green sukuk adalah instrumen pembiayaan tematik yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan. Pada level ritel, seri ST014T4 tahun 2025 dan ST015T4 tahun 2025 diposisikan sebagai Green Sukuk Ritel untuk membiayai proyek hijau dalam APBN. Penjualan ST015 mencapai Rp15 triliun, dengan Rp4 triliun di antaranya berasal dari seri green sukuk ritel ST015T4. Kehadiran instrumen seperti ini penting karena memperluas basis pembiayaan hijau dari investor institusional ke masyarakat ritel, sekaligus menanamkan budaya bahwa keberlanjutan juga dapat menjadi pilihan investasi rumah tangga. ([DJPPR](#))

Di luar instrumen negara, investasi hijau juga berkembang lewat pembiayaan korporasi. Contoh yang menarik adalah pengumuman IFC pada Februari 2025 mengenai sustainability-linked loan pertama di Indonesia untuk PT Nirvana Wastu Pratama. Pinjaman ini digunakan untuk memperluas sertifikasi bangunan hijau pada portofolio properti ritel dan logistik. Kasus ini memperlihatkan bahwa ESG bukan hanya relevan bagi sektor energi atau kehutanan, tetapi juga bagi sektor properti, logistik, dan infrastruktur komersial. Dengan kata lain, investasi hijau tidak semata soal “membangun pembangkit surya”; ia juga soal membuat aset bisnis konvensional menjadi lebih efisien, rendah emisi, dan terukur dampaknya. ([IFC](#))

Pasar karbon merupakan jalur penting lain. BEI melalui IDXCarbon menjelaskan bahwa bursa karbon dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di Indonesia sebagai dukungan bagi pencapaian NDC. OJK pada 2026 juga menegaskan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) guna mendukung implementasi Perpres 110/2025 tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Secara strategis, pasar karbon membuka kemungkinan baru: perusahaan yang mampu menurunkan emisi secara terukur dan terdokumentasi dapat memasuki mekanisme transaksi yang sebelumnya tidak tersedia. Ini memberi sinyal bahwa biaya dan manfaat karbon akan makin masuk ke logika bisnis. ([My Company](#))

Investasi hijau juga semakin terkait dengan agenda pembangunan jangka panjang. Bappenas pada 2025 menegaskan bahwa RPJPN 2025–2045 menempatkan green economy sebagai agenda sentral transformasi nasional. Pada 2026, Bappenas bersama GGGI menyiapkan Green Indonesia Future Initiative sebagai kelanjutan program pertumbuhan hijau, dengan fokus antara lain pada investasi hijau, aksi iklim, penilaian karbon, dan lanskap berkelanjutan. Ini berarti investasi hijau di Indonesia tidak lagi berdiri sebagai proyek ad hoc, melainkan mulai dibingkai sebagai arsitektur ekonomi masa depan. ([Perpustakaan Bappenas](#))

5. Sektor-Sektor Kunci bagi Investasi Hijau di Indonesia

Sektor pertama yang paling jelas adalah energi. Kementerian ESDM melaporkan bahwa bauran energi baru terbarukan nasional pada 2025 mencapai 15,75 persen, meningkat dari tahun sebelumnya, sementara bauran EBT khusus sektor ketenagalistrikan mencapai 16,3 persen dan melampaui target RUKN 15,9 persen. Di sisi perencanaan, RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan sekitar 76 persen berasal dari EBT dan sistem penyimpanan energi. Ini menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, Indonesia masih menghadapi gap yang besar terhadap ambisi 23 persen; kedua, ruang investasi untuk menutup gap tersebut juga sangat besar. ([Energy Ministry Indonesia](#))

Bagi dunia usaha, implikasinya signifikan. Perusahaan energi, manufaktur, konstruksi, teknologi, pembiayaan, dan logistik akan ikut terdorong menyesuaikan diri dengan arah investasi baru. Kebutuhan pada pembangkit surya, angin, panas bumi, hidro, battery storage, efisiensi energi industri, hingga digitalisasi jaringan listrik akan menciptakan ekosistem baru pemasok, konsultan, pengembang proyek, dan penyedia jasa pendukung. Dengan demikian, transisi energi bukan hanya soal pembangkitan listrik, tetapi soal lahirnya rantai nilai baru yang menghubungkan teknologi, pembiayaan, dan operasi. ([Energy Ministry Indonesia](#))

Sektor kedua adalah kawasan industri dan hilirisasi. Di World Expo Osaka 2025, Bappenas mengumumkan komitmen investasi USD 22 miliar untuk pengembangan kawasan industri hijau berkelanjutan. Ini menandakan bahwa daya tarik investasi ke depan tidak cukup bertumpu pada ketersediaan lahan atau bahan baku, tetapi juga pada kualitas energi, efisiensi sumber daya, dan desain kawasan yang mendukung dekarbonisasi. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai basis industri hilir, tetapi keunggulan itu akan semakin tergantung pada

kemampuannya membangun “industrial upgrading” yang berkelanjutan. ([Bappenas](#))

Sektor ketiga adalah bangunan dan properti. Kasus IFC–NWP memperlihatkan bahwa bangunan hijau mulai memperoleh pengakuan sebagai objek pembiayaan yang layak dan strategis. Bagi Indonesia yang mengalami urbanisasi dan ekspansi logistik digital, gedung komersial, pusat distribusi, kampus, rumah sakit, hotel, dan kawasan mixed-use akan semakin dinilai dari efisiensi energi, kualitas material, pengelolaan air, dan jejak karbon operasionalnya. Dalam jangka menengah, properti yang tidak adaptif terhadap standar hijau dapat menghadapi biaya operasional lebih tinggi, persepsi risiko lebih besar, dan valuasi yang kurang menarik. ([IFC](#))

Sektor keempat adalah UMKM hijau. White paper Bappenas–ADB 2025 menegaskan bahwa Green SMEs memiliki potensi besar mendorong penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan transformasi ekonomi yang selaras iklim. Ini penting karena sering kali ESG dibaca seolah hanya agenda korporasi besar. Padahal di Indonesia, masa depan bisnis sangat ditentukan oleh kapasitas UMKM untuk naik kelas melalui efisiensi energi, bahan baku berkelanjutan, produksi bersih, akses pembiayaan hijau, dan integrasi ke rantai pasok perusahaan yang lebih besar. Jika UMKM gagal masuk ke arus ini, maka transisi hijau berisiko menjadi proyek elite ekonomi. ([Perpustakaan Bappenas](#))

6. ESG sebagai Sumber Daya Saing Baru

Ada pandangan lama yang menganggap ESG sebagai beban tambahan. Dalam pandangan ini, keberlanjutan diposisikan sebagai biaya: biaya sertifikasi, biaya audit, biaya pelaporan, atau biaya teknologi bersih. Pandangan tersebut hanya melihat jangka pendek. Dalam perspektif yang lebih luas, ESG justru adalah mekanisme untuk menurunkan biaya tersembunyi yang selama ini sering diabaikan, seperti biaya litigasi, biaya reputasi, biaya konflik sosial, biaya kecelakaan kerja, biaya inefisiensi energi, hingga biaya kehilangan akses pasar dan pembiayaan. Maka,

perusahaan yang serius membangun ESG sebenarnya sedang menata fondasi daya saing jangka panjang. ([OJK Portal](#))

Di pasar keuangan, daya saing ini terhubung dengan kualitas informasi. Ketika BEI menghadirkan kanal ESG Reporting dan indeks ESG Leaders, perusahaan mulai berhadapan dengan tekanan perbandingan yang lebih tinggi. Investor, analis, bank, dan pemberi pinjaman akan lebih mudah memilah perusahaan yang hanya memiliki narasi, dan perusahaan yang benar-benar memiliki disiplin pengungkapan. Dalam kondisi seperti itu, ESG menjadi semacam “bahasa kredibilitas.” Perusahaan yang lebih siap mengungkap eksposur risiko, target, dan progresnya akan lebih mudah masuk ke percakapan investasi jangka panjang. ([Sustainability IDX](#))

Pada level operasional, ESG juga mendorong inovasi. Ketika perusahaan mulai memetakan konsumsi energi, emisi, penggunaan air, limbah, dan dampak sosial, mereka sesungguhnya sedang membangun peta inefisiensi. Banyak inovasi proses lahir bukan dari ambisi abstrak menjadi hijau, melainkan dari upaya sangat konkret untuk mengurangi kehilangan energi, mempersingkat logistik, mengurangi cacat produksi, menekan limbah bahan baku, atau memperbaiki keselamatan kerja. Dari sini terlihat bahwa keberlanjutan dan produktivitas tidak selalu berlawanan; sering justru saling menguatkan. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Daya saing baru ini juga bersifat geopolitik. Dunia bergerak menuju rantai pasok yang lebih terukur, terutama untuk komoditas, manufaktur, mineral kritis, dan produk dengan jejak karbon tinggi. Jika Indonesia ingin menjadi basis produksi penting dalam era transisi energi, maka perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya harus mampu menjawab pertanyaan pasar global tentang asal bahan baku, jejak lingkungan, keselamatan tenaga kerja, dan tata kelola. Artinya, ESG bukan hanya alat untuk memuaskan regulator domestik, tetapi syarat agar perusahaan Indonesia tetap kompatibel dengan pasar global yang makin selektif. (kemenlh.go.id)

7. Tantangan Struktural: Ambisi Besar, Implementasi Tidak Mudah

Meskipun arah kebijakan tampak progresif, implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama adalah kesenjangan kapasitas. OJK dalam SMART 2025 menunjukkan bahwa sektor perbankan telah berkembang dalam komitmen dan tata kelola keberlanjutan, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam integrasi risiko iklim ke manajemen risiko dan penyelarasan strategi bisnis dengan target transisi. Jika sektor perbankan saja masih berada dalam fase penguatan, maka tantangan pada emiten non-keuangan, perusahaan menengah, dan UMKM tentu lebih besar lagi. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Kedua adalah problem data. ESG membutuhkan metrik yang dapat diukur, namun banyak perusahaan masih berada pada tahap dasar inventarisasi. Data emisi, intensitas energi, rantai pasok, paparan risiko iklim, dan dampak sosial belum selalu tersedia dengan kualitas yang memadai. Itulah sebabnya OJK menekankan pentingnya taksonomi, laporan maturitas, dan asesmen risiko iklim. Tanpa data yang tertib, ESG mudah berubah menjadi jargon yang indah tetapi rapuh. ([OJK Portal](#))

Ketiga adalah risiko greenwashing. OJK sendiri menekankan bahwa taksonomi dibutuhkan antara lain untuk mengurangi greenwashing, social washing, dan impact washing. Risiko ini nyata karena tekanan reputasi sering lebih cepat daripada kemampuan transformasi operasional. Banyak perusahaan tergoda memoles laporan sebelum memperbaiki proses. Dalam jangka pendek, langkah itu mungkin menghasilkan pujian. Dalam jangka menengah, ia berpotensi merusak kepercayaan investor dan publik. Justru di titik inilah governance menjadi penting: siapa yang memverifikasi klaim? bagaimana target ditetapkan? apakah insentif manajemen sejalan dengan sasaran keberlanjutan? ([OJK Portal](#))

Keempat adalah kontradiksi antara agenda pertumbuhan cepat dan perlindungan ekologis. Reuters melaporkan bahwa kehilangan hutan Indonesia melonjak 66 persen pada 2025 menjadi 433.751 hektare, dipicu

antara lain oleh konversi untuk cadangan pangan, bioenergi, sawit, dan tambang. Dalam laporan lain, Reuters memberitakan temuan pelanggaran lingkungan serius di kawasan pengolahan nikel Morowali, serta pencabutan izin beberapa perusahaan tambang nikel di Raja Ampat setelah protes publik atas dampak lingkungan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masa depan investasi hijau di Indonesia tidak akan kredibel jika transisi hanya dipahami sebagai pergeseran komoditas—misalnya dari batubara ke mineral kritis—tanpa reformasi tata kelola ekologis dan sosial. ([Reuters](#))

Kelima adalah tantangan pembiayaan transisi. Tidak semua sektor dapat berubah seketika menjadi hijau. Banyak industri berada di ruang transisi: masih bergantung pada energi fosil, tetapi harus bergerak menuju efisiensi dan dekarbonisasi bertahap. Di sinilah TKBI menjadi penting, sebab ekonomi Indonesia membutuhkan bukan hanya pembiayaan untuk aktivitas hijau murni, tetapi juga pembiayaan transisi yang kredibel. Masalahnya, pembiayaan transisi selalu sarat debat: seberapa cepat? untuk aktivitas apa? bagaimana mencegah transisi palsu? Masa depan bisnis di Indonesia akan bergantung pada kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara jujur dan terukur. ([OJK Portal](#))

8. Narasi Kasus: Dari Kepatuhan ke Transformasi

Untuk memahami perubahan ini secara lebih konkret, kita dapat membayangkan tiga tipe perusahaan. Tipe pertama adalah perusahaan yang memandang ESG sebagai dokumen. Perusahaan ini menyusun laporan keberlanjutan karena diwajibkan, membentuk tim kecil, mengumpulkan data seadanya, dan menekankan aktivitas filantropi. Hasilnya, perusahaan mungkin patuh secara formal, tetapi tidak mengubah model operasi, tata kelola risiko, atau logika investasinya. Dalam jangka panjang, perusahaan seperti ini cenderung tertinggal karena ESG diperlakukan sebagai lampiran, bukan mesin perubahan. Regulasi OJK

menunjukkan bahwa sekadar laporan tanpa integrasi strategi tidak akan cukup. ([OJK Portal](#))

Tipe kedua adalah perusahaan yang memandang ESG sebagai efisiensi. Ia mulai menghitung konsumsi energi, limbah, keselamatan kerja, dan kualitas pemasok. Perusahaan seperti ini biasanya menemukan bahwa sebagian agenda ESG justru memperbaiki produktivitas. Penggunaan energi menurun, limbah berkurang, kecelakaan kerja menurun, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan membaik. Di tahap ini, ESG mulai menciptakan nilai, tetapi sering belum sepenuhnya masuk ke strategi pertumbuhan. Banyak perusahaan Indonesia dapat bergerak cepat ke tahap ini bila kepemimpinan internal cukup kuat dan sistem pengukuran mulai ditertibkan. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Tipe ketiga adalah perusahaan yang memandang ESG sebagai strategi pertumbuhan masa depan. Perusahaan ini tidak hanya memperbaiki operasinya, tetapi juga mengubah struktur portofolio, memilih proyek yang selaras dengan taksonomi, mengaitkan pembiayaan dengan target keberlanjutan, dan membangun tata kelola yang siap diaudit oleh pasar. Kasus sustainability-linked loan IFC untuk pengembangan bangunan hijau menunjukkan logika ini: keberlanjutan bukan biaya tambahan, melainkan bagian dari cara aset masa depan didanai dan dinilai. Dalam tipe ini, ESG tidak lagi bersifat defensif; ia menjadi sumber inovasi dan akses modal. ([IFC](#))

9. Implikasi Manajerial bagi Dunia Usaha Indonesia

Bagi manajemen perusahaan, implikasi pertama adalah perlunya memindahkan ESG dari unit perifer ke tingkat dewan dan direksi. Jika isu lingkungan dan sosial hanya dibicarakan oleh divisi kecil tanpa akses ke keputusan investasi, maka perubahan tidak akan terjadi. POJK 51/2017 sendiri mengharuskan rencana aksi keuangan berkelanjutan disusun direksi dan disetujui dewan komisaris. Ini menegaskan bahwa ESG adalah agenda kepemimpinan, bukan proyek teknis semata. ([OJK Portal](#))

Implikasi kedua adalah kebutuhan untuk memilih isu material. Tidak semua perusahaan menghadapi risiko ESG yang sama. Bank harus fokus pada paparan portofolio dan risiko pembiayaan. Perusahaan manufaktur perlu memetakan energi, air, limbah, keselamatan kerja, dan rantai pasok. Perusahaan tambang menghadapi isu lahan, limbah, keselamatan, relasi komunitas, dan transisi energi. Sektor properti menekankan efisiensi bangunan dan standar konstruksi hijau. Artinya, keberhasilan ESG tidak ditentukan oleh jumlah indikator terbanyak, tetapi oleh kemampuan memilih isu yang paling material dan mengelolanya secara disiplin. ([OJK Portal](#))

Implikasi ketiga adalah pentingnya sistem data dan assurance. Perusahaan yang ingin memperoleh manfaat pembiayaan hijau harus mampu menunjukkan baseline, target, capaian, dan metodologi. Tanpa itu, klaim keberlanjutan akan sulit dipercaya. Kehadiran ESG Reporting BEI, ESG Score, TKBI, dan laporan-laporan OJK menunjukkan bahwa ekosistem Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih berbasis data. Perusahaan yang lambat membangun sistem pengukuran akan menghadapi biaya penyesuaian yang lebih besar di kemudian hari. ([Sustainability IDX](#))

Implikasi keempat adalah perlunya strategi transisi, bukan sekadar target akhir. Banyak perusahaan tergoda menetapkan sasaran net zero tanpa peta jalan yang realistis. Padahal, investor dan regulator justru semakin memperhatikan kredibilitas transisi: langkah apa dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? bagaimana risiko ditangani? dari mana pembiayaan diperoleh? apa dampaknya pada pekerja dan komunitas? Di Indonesia, pembiayaan transisi akan menjadi tema sentral karena banyak sektor penting tidak bisa “langsung hijau.” Karena itu, perusahaan memerlukan narasi transisi yang terukur, bukan janji yang hiperbolik. ([OJK Portal](#))

Implikasi kelima adalah kemitraan. ESG terlalu besar untuk dikerjakan sendirian. Perusahaan membutuhkan kolaborasi dengan regulator, bank, penyedia teknologi, konsultan, pemasok, perguruan tinggi, dan komunitas.

Arsitektur kebijakan Indonesia sendiri menekankan koordinasi dan kolaborasi sebagai prinsip keuangan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perusahaan yang mampu membangun ekosistem kemitraan akan lebih mudah memperoleh akses teknologi, pembiayaan, dan legitimasi sosial dibanding mereka yang bekerja secara tertutup. ([OJK Portal](#))

10. Masa Depan Bisnis di Indonesia: Lima Arah Utama

Pertama, masa depan bisnis Indonesia akan semakin ditentukan oleh transparansi. Pasar akan menuntut data yang lebih rapi mengenai emisi, risiko, tata kelola, dan target transisi. Dengan kanal ESG Reporting dan penguatan kerangka OJK, perusahaan yang tertib mengungkapkan informasi akan memiliki posisi yang lebih baik daripada perusahaan yang menunda keterbukaan. Transparansi akan menjadi bagian dari valuasi. ([Sustainability IDX](#))

Kedua, akses modal akan semakin selektif. Instrumen seperti green sukuk, sustainability-linked financing, pasar karbon, dan taksonomi pembiayaan berkelanjutan menunjukkan bahwa modal masa depan tidak sepenuhnya netral terhadap kualitas dampak. Perusahaan yang lebih siap menyesuaikan proyeknya dengan kerangka hijau atau transisi yang kredibel akan lebih mudah memperoleh pembiayaan, sedangkan yang tidak siap akan menghadapi premi risiko lebih tinggi. ([Kemenkeu Media](#))

Ketiga, sektor-sektor yang mendukung transisi akan berkembang lebih cepat: energi terbarukan, storage, efisiensi energi, bangunan hijau, pengelolaan air, pengolahan limbah, mobilitas rendah karbon, data dan verifikasi ESG, konsultasi transisi, serta pembiayaan berkelanjutan. RUPTL 2025–2034 dan agenda kawasan industri hijau menandakan bahwa pertumbuhan tidak lagi hanya berada pada ekspansi kapasitas lama, tetapi pada pembentukan infrastruktur ekonomi baru. ([Energy Ministry Indonesia](#))

Keempat, perusahaan yang mengabaikan aspek sosial akan menghadapi kerentanan baru. Transisi yang tidak adil dapat memicu konflik komunitas,

resistensi tenaga kerja, dan delegitimasi politik. Karena itu, ESG yang baik tidak dapat dibangun dengan menekankan E sambil mengabaikan S. Dalam konteks Indonesia yang plural, padat karya, dan memiliki banyak wilayah ekstraktif, dimensi sosial justru sering menentukan apakah proyek hijau memperoleh izin sosial untuk berjalan. ([OJK Portal](#))

Kelima, governance akan menjadi pembeda paling menentukan. Dalam jangka pendek, perusahaan mungkin dapat mengiklankan program hijau. Dalam jangka panjang, hanya tata kelola yang kuat yang dapat memastikan target keberlanjutan tidak berubah menjadi greenwashing. Kasus reformasi pasar saham Indonesia yang didorong untuk memperbaiki transparansi setelah gejolak pasar pada awal 2026 memberi pengingat bahwa kepercayaan investor akhirnya kembali pada kualitas governance. ESG yang matang selalu berujung pada tata kelola yang lebih disiplin, lebih terbuka, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. ([Reuters](#))

11. Penutup

ESG, investasi hijau, dan masa depan bisnis di Indonesia sesungguhnya berbicara tentang satu hal yang sama: redefinisi nilai. Nilai perusahaan pada masa depan tidak cukup diukur dari seberapa besar ia tumbuh, tetapi juga dari seberapa tahan ia terhadap risiko iklim, seberapa adil ia memperlakukan manusia, seberapa bertanggung jawab ia menggunakan sumber daya, dan seberapa jujur ia mengelola informasi. Indonesia telah membangun fondasi penting melalui regulasi OJK, TKBI, pelaporan ESG di pasar modal, green sukuk, pasar karbon, dan integrasi ekonomi hijau ke dalam dokumen pembangunan nasional. Fondasi itu menandakan bahwa negara sedang menyiapkan ekosistem bagi transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. ([OJK Portal](#))

Namun fondasi bukanlah bangunan. Tantangan besar masih ada: kapasitas yang timpang, kualitas data yang belum merata, kontradiksi antara pertumbuhan dan perlindungan ekologi, serta risiko bahwa ESG berhenti sebagai bahasa simbolik. Karena itu, yang menentukan bukan hanya

keberadaan regulasi, melainkan keberanian organisasi untuk berubah. Masa depan bisnis di Indonesia akan dimenangkan oleh perusahaan yang mampu membaca ESG bukan sebagai beban kepatuhan, melainkan sebagai kompas strategis. Di era ketika modal, pasar, dan legitimasi sosial semakin bergerak menuju keberlanjutan, perusahaan yang menolak berubah mungkin masih hidup beberapa saat, tetapi akan makin sulit memimpin. Sebaliknya, perusahaan yang berhasil memadukan profitabilitas, tanggung jawab, dan kredibilitas akan menjadi aktor utama ekonomi Indonesia yang baru. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

Glosarium

CBRA (Climate Risk and Banking Resilience Assessment): kerangka asesmen OJK untuk menilai dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan. ([OJK Portal](https://www.ojk.go.id))

ESG: kerangka evaluasi perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam konteks Indonesia, ia terhubung erat dengan keuangan berkelanjutan, manajemen risiko, dan akses modal. (keuanganberkelanjutan.ojk.go.id)

ESG Reporting: mekanisme pelaporan metrik ESG oleh emiten melalui sistem keterbukaan informasi BEI. ([Sustainability IDX](https://sustainability.idx.co.id))

Green Sukuk: surat berharga syariah negara atau instrumen syariah lain yang hasil penerbitannya dialokasikan untuk pembiayaan proyek hijau. ([DJPPR](https://www.djppr.go.id))

IDX ESG Leaders: indeks BEI yang mencerminkan saham-saham dengan kepemimpinan ESG, likuiditas baik, dan tanpa kontroversi signifikan. ([Sustainability IDX](https://sustainability.idx.co.id))

IDXCarbon: infrastruktur perdagangan karbon Indonesia yang dikembangkan oleh BEI. ([My Company](#))

Investasi hijau: penempatan modal pada proyek atau aset yang mendukung tujuan lingkungan dan keberlanjutan, biasanya dengan perhatian pada aspek sosial dan tata kelola. ([DJPPR](#))

Keuangan berkelanjutan: dukungan menyeluruh sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. ([OJK Portal](#))

NDC (Nationally Determined Contribution): komitmen nasional suatu negara dalam kerangka Paris Agreement untuk pengurangan emisi dan aksi iklim. ([UNFCCC](#))

SMART 2025: laporan OJK yang memetakan tingkat kematangan penerapan keberlanjutan pada sektor perbankan Indonesia. ([keuanganberkelanjutan.ojk.go.id](#))

SRUK (Sistem Registri Unit Karbon): sistem registri unit karbon yang dikembangkan untuk mendukung implementasi nilai ekonomi karbon dan integritas transaksi karbon di Indonesia. ([OJK Portal](#))

TKBI (Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia): klasifikasi aktivitas ekonomi untuk mendukung alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan serta mengurangi greenwashing. ([OJK Portal](#))

Referensi (APA 7)

Asian Development Bank. (2025). *ASEAN catalytic green finance facility 2025*. ([Asian Development Bank](#))

Bursa Efek Indonesia. (n.d.). *IDX ESG Leaders*. ([Sustainability IDX](#))

Bursa Efek Indonesia. (2025, January 22). *Indonesia Stock Exchange launched ESG Reporting integrated into disclosure system for listed companies.* ([Sustainability IDX](#))

Bursa Efek Indonesia. (n.d.). *IDXCarbon.* ([My Company](#))

Bappenas. (2025, May 29). *Di World Expo 2025 Osaka, Indonesia teken investasi USD 22 miliar untuk pengembangan kawasan industri hijau berkelanjutan.* ([Bappenas](#))

Bappenas. (2025). *Green SMEs and net zero: Strategic framework for Indonesia's climate-aligned economic transformation.* ([Perpustakaan Bappenas](#))

Bappenas. (2026, March 6). *Bappenas–GGGI tutup Green Growth Program fase III, siapkan transformasi pertumbuhan hijau melalui Green Indonesia Future Initiative.* ([Bappenas](#))

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, December 4). *Green sukuk sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk perubahan iklim.* ([DJPPR](#))

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, April 21). *Hasil penjualan Sukuk Tabungan ST014.* ([Kemenkeu Media](#))

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, December 8). *Hasil penjualan Sukuk Tabungan ST015.* ([Kemenkeu Media](#))

IFC. (2025, February 6). *IFC's first sustainability-linked loan in Indonesia to decarbonize retail properties and support green building development.* ([IFC](#))

Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2025, May 26). *Menteri ESDM umumkan RUPTL PLN 2025–2034, serap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru.* ([Energy Ministry Indonesia](#))

Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2026, January 9). *Bauran EBT di sektor listrik lampau target RUKN*. ([Energy Ministry Indonesia](#))

Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2026). *Capaian positif tahun 2025, negara hadir penuhi kebutuhan energi masyarakat*. ([Energy Ministry Indonesia](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Indonesia taxonomy for sustainable finance 2025: FAQ and guidance*. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3*. ([OJK Portal](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Banking Sustainability Maturity Assessment Report (SMART) 2025*. ([keuanganberkelanjutan.ojk.go.id](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) 2026*. ([OJK Portal](#))

Reuters. (2025, June 10). *Indonesia revokes nickel ore mining permits in Raja Ampat after protest*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, June 18). *Indonesia finds environmental violations in Morowali nickel hub*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 31). *Indonesian forest loss surges by 66% in 2025, driven by self-sufficiency drive, report shows*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, April 2). *Indonesia says stock market reform drive completed after February's selloffs*. ([Reuters](#))

UNFCCC. (2025). *Republic of Indonesia second NDC*. ([UNFCCC](#))

World Bank. (2023). *Indonesia country climate and development report*.
([World Bank](#))

World Bank. (2025, June 15). *World Bank approves investments to boost*
Indonesia's economic growth and access to clean energy. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 4 April
2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d0f65f-03c8-839b-a7a4-6ac76794fc20>